

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Jepara**

Jepara berdiri sebagai satu Kabupaten berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara berdiri dengan ibu kota Jepara.

Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai suatu organisasi telah menyusun dan menetapkan beberapa lembaga/instansi otonom berdasarkan peraturan daerah, yang berfungsi untuk melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

##### **4.1.2. Visi dan Misi Kabupaten Jepara**

Visi Kabupaten Jepara : MEWUJUDKAN JEPARA MADANI YANG BERKARAKTER, MAJU DAN BERDAYA SAING.

Untuk mewujudkan Visi di atas, maka harus ditetapkan juga Misi yang harus mendapatkan perhatian seksama dimana tugas yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Jepara adalah :

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya.

2. Pendaya gunaan Sumber daya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat.
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan.
5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional.

#### 4.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara memiliki 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari sekretariat daerah, kesekretariatan, badan, kecamatan dan dinas yang dapat dilihat pada table berikut :

##### Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

No	Instansi / Unit Kerja
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
3	Inspektorat
4	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
5	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
6	Badan Kepegawaian Daerah
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

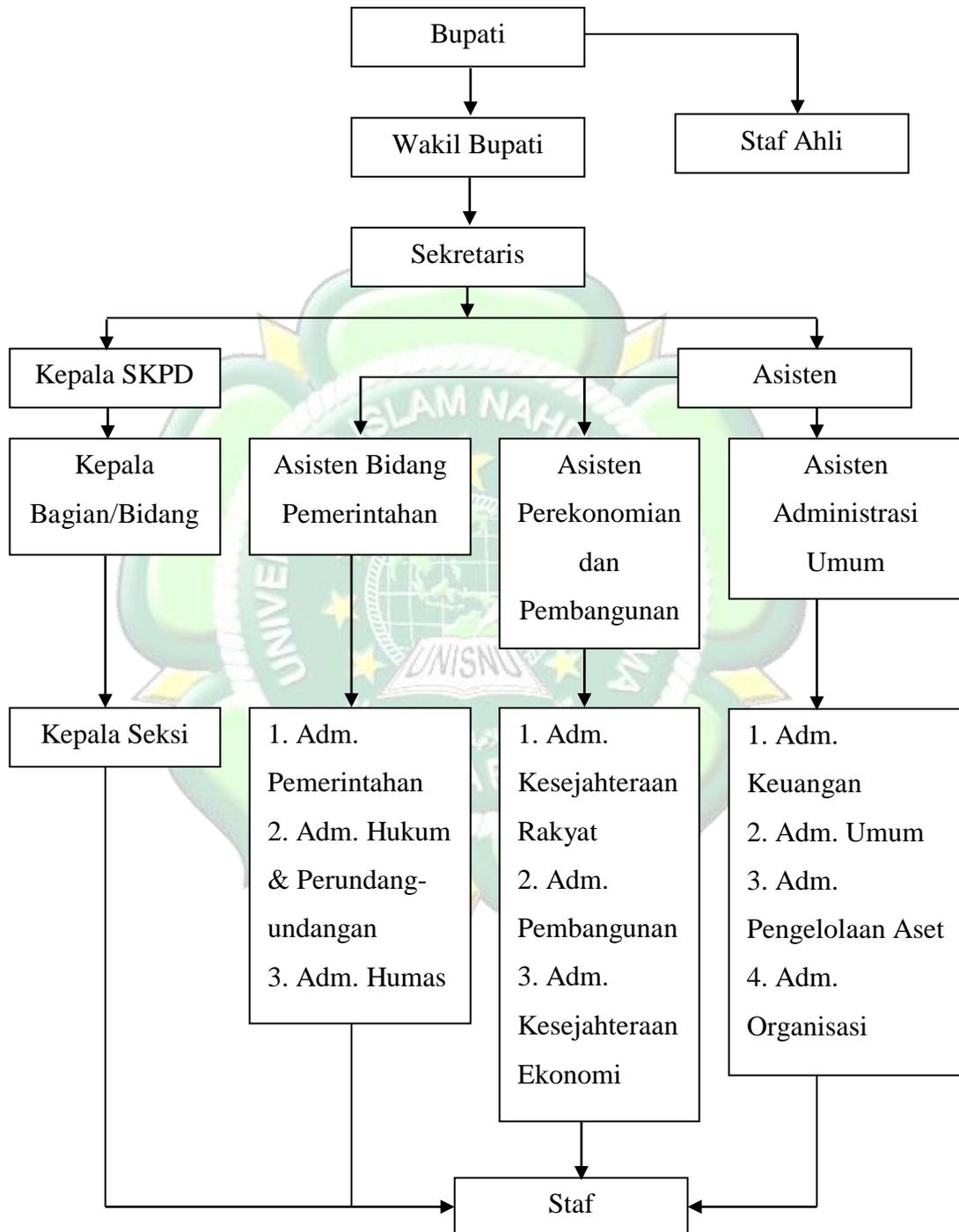
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11	Kecamatan Bangsri
12	Kecamatan Batealit
13	Kecamatan Donorojo
14	Kecamatan Jepara
15	Kecamatan Kalinyamatan
16	Kecamatan Karimun Jawa
17	Kecamatan Kedung
18	Kecamatan Keling
19	Kecamatan Kembang
20	Kecamatan Mayong
21	Kecamatan Mlonggo
22	Kecamatan Nalumsari
23	Kecamatan Pakis Aji
24	Kecamatan Pecangaan
25	Kecamatan Tahunan
26	Kecamatan Welahan
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
28	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
29	Dinas Kesehatan
30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
31	Dinas Komunikasi dan Informasi

32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
33	Dinas Lingkungan Hidup
34	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
36	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
39	Dinas Perhubungan
40	Dinas Perikanan
41	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
42	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
43	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
44	RSUD Kartini Jepara

#### 4.1.4. Struktur Organisasi

**Gambar 4. 1**

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Jepara



## 4.2. Deskriptif Data Responden

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan sebanyak 44 kuesioner. Guna mendapat gambaran mengenai karakteristik responden yang akan diteliti, dilakukan pengujian data melalui perhitungan statistik deskriptif. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang didapat dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

### 1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	20	47
Perempuan	24	53
Total	44	100

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa responden perempuan sebanyak 24 orang atau sekitar 53 % lebih besar dibandingkan jumlah responden laki-laki yang hanya berjumlah 20 orang atau sekitar 47 %.

### 2. Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
S1	44	100
Total	44	100

Dari tabel diatas, menunjukan bahwa pedidikan responden yang terlibat dalam proses penyusunan, pelaporan dan pemeriksaan laporan keuangan secara langsung bergelar S1.

### 3. Usia

#### Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
25 s/d 30	2	5
30 s/d 35	22	49
>35	20	47
Total	44	100

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa kebanyakan responden berumur 30 s/d 35 tahun, yaitu sebanyak 22 orang, sedangkan berumur >35 tahun sebanyak 20 orang dan paling sedikit berumur 25 s/d 30 tahun sebanyak 2 orang, yang semua itu merupakan kepala bagian keuangan atau staf bagian keuangan (bendahara) semua SKPD Kabupaten Jepara.

### 4. Lama Bekerja

#### Lama Bekerja Responden

Lama Bekerja	Frekuensi	Persentase (%)
5 s/d 10	2	5
10 s/d 15	15	35

>15	27	60
Total	44	100

Berdasarkan dari tabel diatas, menunjukkan jumlah responden yang paling lama berkerja yaitu lebih dari 15 tahun sebanyak 27 responden. Ini menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengalaman dalam pekerjaan khususnya yang terkait dengan proses pelaporan laporan keuangan adalah respinden yang paling lama masa kerjanya.

#### 4.3. Deskripsi Data Variabel (X)

##### **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X)**

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Indra Bastian (2005:134), Penerapan standard akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan untuk menyusun serta menyediakan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP ialah persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. "Dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 dijelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat mencukupi manfaatnya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang dibutuhkan agar laporan keuangan pemerintah bisa memnuhi kualitas yang dikehendaki:

##### 1. Relevan

2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan dengan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan :

Tanggapan Responden Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

No	Pertanyaan	SD	SBD	KKD	SKD	TD
		1	2	3	4	5
1	Pencatatan asset sudah didukung dengan bukti - bukti sesuai ketentuan	28	10	2		
2	Pencatatan utang sudah didukung dengan bukti - bukti sesuai ketentuan	23	19	2		
3	Modal sudah didukung dengan bukti-bukti asesuaian ketentuan	22	18	4		
4	Laporan realisasi anggaran sudah didukung berdasarkan bukti-bukti sesuai ketentuan	28	16			
5	Pengelolaan keuangan sudah ada pemisahan tugas fungsi dan	24	18			

	tanggung jawab					
6	Pengelola keuangan telah memahami penata usahaan keuangana sesuai ketentuan	11	8	25		
7	Pengelola keuangan berlatar belakang pendidikan akuntansi	21	9	14		
8	Sarana/prasarana didalam pengelolaan keuangan yang dimiliki telah imemadai	29	15			
9	Anggaran sipenerimaan dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran pengeluaran	22	8	14		

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan mayoritas responden yang menyatakan sudah diterapkan untuk jawaban penerapan standar akuntansi pemerintahan.

#### 4.4. Deskripsi Data Variabel (Y)

##### **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)**

Kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan ialah ukuran - ukuran normatif yang harus direalisasikan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi manfaatnya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang dibutuhkan supaya laporan keuangan pemerintah daerah bisa memenuhi kualitas yang dikehendaki.

- a. Relevan. Laporan keuangan dapat disebut relevan jika informasi yang termuat didalamnya bisa mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu/ masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan/mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan bisa dikaitkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah:
  - Memiliki manfaat iumpang balik. Informasi memungkinkan pengguna agar menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.
  - Memiliki tujuan Auprediktif. Informasi bisa membantu pengguna agar memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disediakan selengkap mungkin yaitu mencakup seluruh informasi akuntansi yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan.
- b. Andal. informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material serta menyajikan sikap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, namun jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi secara potensial bisa menyesatkan.
- c. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika bisa dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya/ laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
- Perbandingan secara internal. bisa dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
  - Perbandingan secara eksternal. Bisa dilaksanakan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
- d. Dapat dipahami. Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan bisa dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam

bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Oleh karena itu pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauanm pemakai untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berikut ini adalah tanggapan responden berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah :

#### Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

No	Pertanyaan	SD	SBD	KKD	SKD	TD
		1	2	3	4	5
1	SKPD menyajikan informasi yang relevan	41	3			
2	SKPD menyajikan informasi yang andal	40	4			
3	SKPD menyajikan informasi yang dapat dibandingkan dan jelas	40	4			
4	SKPD menyajikan informasi yang dapat dipahami	42	2			

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa mayoritas responden menyatakan telah menyajikan informasi untuk memenuhi kualitas laporan keuangan sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan mayoritas responden yang menyatakan

seluruhnya diterapkan dengan jumlah perolehan 40 s/d 42 jawaban untuksikualitas laporan keuangan pemerintah

#### 4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

##### 4.5.1 Pengujian Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat mengukur apa yang ingin diukur. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila  $(r) > r_{.}$  nilai  $r$  hitung adalah nilai- nilai yang berada dalam kolom “*corrected item total correlation*”

Berikut hasil uji validitas menggunakan SPSS

#### Hasil Uji Validitas Variabel X Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Item	Corrected	r-tabel	Hasil
Item1	0,788	0,353	Valid
Item2	0,782	0,353	Valid
Item3	0,752	0,353	Valid
Item4	0,586	0,353	Valid
Item5	0,661	0,353	Valid
Item6	0,474	0,353	Valid
Item7	0,488	0,353	Valid
Item8	0,448	0,353	Valid
Item9	0,481	0,353	Valid

Berdasarkan Tabel terlihat bahwa nilai r-tabel pada pertanyaan variabel X menunjukkan angka yang lebih besar dari r-tabel (0,353) menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian

### Hasil Uji Validitas Variabel Y

#### Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Item	Corrected	r-tabel	Hasil
Y.1	0,573	0,353	Valid
Y.2	0,468	0,353	Valid
Y.3	0,682	0,353	Valid
Y.4	0,725	0,353	Valid

Berdasarkan Tabel terlihat bahwa nilai r-tabel pada semua item pertanyaan variabel Y menunjukkan angka yang lebih besar dari r-tabel (0,353) menunjukkan bahwa semua item pertanyaan tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian

#### 4.5.2 Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya dalam mendapatkan data penelitian, baik dalam waktu sekarang maupun yang akan datang. Uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* (r-Alpha) minimal 0,60 maka alat ukur dinyatakan reliabel.

### Hasil Uji Reliabilitas Variabel X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,739	9

Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk variabel X menunjukkan bahwa variabel X memiliki nilai Cronbach's lebih besar dari 0,60 yaitu 0,739. Dengan demikian semua item pertanyaan variable X reliabel

### Hasil Uji Reliabilitas Variabel y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,509	4

Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk variabel Y menunjukkan bahwa variabel Y memiliki nilai Cronbach's lebih besar dari 0,60 yaitu 0,509. Dengan demikian semua item pertanyaan variabel X reliabel

#### 4.5.3 Analisa Regresi Sederhana

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi liner sederhana. Uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui ada tidanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dihitung melalui suatu persamaan.

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.314	4.244		1.252	.224
	Penerapan SAP	1.048	.104	.906	10.057	.000

a. Dependent Variabel: Total\_Y

Dari tabel diatas diperoleh rumus regresi sebagai berikut :

$$Y = 5.314 + 1.048 X$$

Dalam persamaan regresi diatas, konstanta adalah sebesar 5.314 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel X yang mempengaruhi, maka variabel Y sebesar 5.314. Dari hasil uji regresi tersebut maka dapat dikatakan :

“Nilai Koefisien Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X) Sebesar 1.048 Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan(Y). yang mengandung arti bahwa setiap kenaikan koefisien penyajian laporan keuangan maka variable kualitas laporan keuangan pemerintah naik sebesar 1.048”.

#### 4.5.4 Pengujian Hipotesis

Uji T yaitu untuk menguji bagaimana masing-masing variabel bebasnya (X) secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel terikatnya (Y).

Diketahui bahwa kriteria uji T, apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Dan sebaliknya, apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya variabel X secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen dengan taraf signifikan 0,05.

**Berikut ini Tabel Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.314	4.244		1.252	.224
	Penerapan SAP	1.048	.104	.906	10.057	.000

a. Dependent Variabel: Total\_Y

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X) dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $10.057 > 0,022$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 10,057 kemudian  $t_{hitung}$  ini dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  sebesar 0,022. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  $t_{hitung}$  ( $10,057$ )  $>$   $t_{tabel}$  ( $0,022$ ), maka  $H_0$  ditolak artinya: penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Jepara. Pernyataan tersebut mengandung

arti bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan maka kualitas laporan keuangan semakin baik.

#### 4.5.5 Uji Determinasi

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.906 <sup>a</sup>	.821	.813	2.586

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasi dengan rumus dibawah ini :

$$(Kd) = r^2 \times 100\%$$

$$= (0,906)^2 \times 100\%$$

$$= 82,1\%$$

Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan nilai  $Kd = 82,1\%$ , ini berarti sebesar 82,1% kinerja SKPD/OPD dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi dan sisanya 17.9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu seperti sarana/prasarana didalam pengelolaan keuangan yang dimiliki

kurang memadai dan pemahaman yang masih kurang dari pengelola keuangan.

sesuai dengan nilai yang diperoleh bahwa kualitas laporan keuangan yang berdasarkan dari prinsipnya yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan yaitu akuntabilitas serta manajemen, transparansi dan antar generasi. Maka dari itu penerapan standar akuntansi pemerintahan mempunyai pengaruh kuat terhadap kualitas laporan keuangan.

